



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTU
PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DI KABUPATEN GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,





- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, diperlukan peran serta masyarakat secara optimal dalam wadah institusi masyarakat bidang Keluarag Berencana di Kelurahan/Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Intitusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
di Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

KABAG HURUM	SKPD	AS 1	SEDA	WABUP
				

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SPK/DA	WABUP
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati Gorontalo Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
5. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat
6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat Program KKBPK adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
7. Kader adalah Kader IMP PPKBD dan Sub PPKBD Kabupaten Gorontalo
8. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional

9. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/Kelurahan. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan.
10. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Rukun Warga
11. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah Kelompok kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang Balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, social budaya, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota keluarga lainnya dengan anak Balita
12. Bina Kelurga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap perilaku dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja baik fisik maupun intelektual, kesehatan reproduksi mental, emosional, sosial, moral spiritual secara seimbang melalui komunikasi efektif anatra orang tua atau keluarga remaja.

ROHOP	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
C	H	w	J	

13. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraan,
14. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah be-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.
15. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
16. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan berkelanjutan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dan suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
18. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
19. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

KABAG HURUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

20. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
21. Pasangan usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang usia berkisar 20-45 tahun yang sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik
22. Unmet Need adalah PUS bukan peserta KB yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai rujukan para pengelola dalam memahami, melaksanakan dan memantau program KKBPK di Desa/ Kelurahan, Dusun/lingkungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyatukan pengertian, persepsi dan pemahaman terhadap kedudukan tugas dan fungsi Kader serta langkah-langkah penting dalam pelaksanaan program di lapangan.





BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan Fungsi Kader dalam rangka peningkatan pencapaian Program KKBPK .

BAB IV
KLASIFIKASI KADER
Pasal 4

Klasifikasi Kader terdiri atas 3 (tiga) yakni :

- a. Kader Klasifikasi Dasar

KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SERDA	WABUP
				

- b. Kader Klasifikasi Berkembang
- c. Kader Klasifikasi Mandiri

Pasal 5

Kader Klasifikasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a melakukan peran :

- a. Pengorganisasian, sudah ada kepengurusan tetapi belum dilakukan pembagian tugas
- b. Pertemuan rutin, belum dilaksanakan secara rutin karena belum ada rencana kerja.
- c. Melakukan Konseling Informasi Edukasi kepada masyarakat
- d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan secara sederhana
- e. Pelayanan kegiatan KB, pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, pil dan rujukan, Bina Keluarga (Minimal satu bina keluarga)
- f. Upaya kemandirian, melakukan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak sama sekali.

Pasal 6

Kader Klasifikasi Berkembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai peran

- a. Pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas kecuali untuk PPKBD dimungkinkan kepengurusannya tunggal.
- b. Pertemuan rutin, dilaksanakan secara rutin/bulanan, sudah ada rencana kerja dan notulen.
- c. Melakukan Konseling Informasi Edukasi dan Komunikasi Inter Personal.
- d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola Reporting Recording.
- e. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap, pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom dan pil, rujukan UPPKS, Bina keluarga (minimal ada satu atau dua bina keluarga).
- f. Upaya kemandirian, melaksanakan dua upaya kemandirian.

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 7

Kader Klasifikasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai peran:

- a. Pengorganisasian, Kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi.
- b. Pertemuan rutin, sudah dilaksanakan setiap bulan, berjenjang, membuat rencana Kerja dan notulen.
- c. Melakukan Konseling Informasi Edukasi dan Komunikasi Inter Personal
- d. Pencatatan, pendataan, dan pemetaan sudah mengikuti pola Reporting Recording
- e. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap, pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom dan pil, rujukan, UPPKS, Bina Keluarga lengkap.
- f. Upaya kemandirian, melaksanakan kegiatan kemandirian.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Kader terdiri atas perorangan atau kelompok yang diangkat dan ditetapkan oleh Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan, menggalang serta mengembangkan kemitraan Program KKBPK di Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi Kader

Pasal 9

Di dalam Pelaksanaan kegiatan, Kader mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian.

KABAG	HURUM	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP

1. Sebagai wadah berbagai kegiatan ditingkat Desa, Kelurahan, Dusun dan lingkungan memerlukan kepengurusan yang paripurna.
 2. Kepengurusan secara kolektif, dan dapat dibagi pembagian kerja dalam menjalankan peran.
 3. Mengembangkan kemampuan kader dalam program KKBPK di wilayah kerja.
- b. Pertemuan Rutin
1. Pertemuan rutin dilaksanakan secara berjenjang dan berkala ditingkat Desa dan Kecamatan.
 2. Pertemuan rutin ditingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh PKB sebagai Pembina wilayah kerja
 3. Pertemuan rutin ditingkat kecamatan dipimpin oleh koordinator PKB Kecamatan
 4. Pertemuan rutin menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, data, bimbingan, pembinaan, Evaluasi, pemecahan masalah, dan perencanaan program KKBPK di lapangan.
- c. Konseling Informasi Edukasi
1. Kader Program KKBPK melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling, program KKBPK.
 2. Mendorong peningkatan kesertaan KB masyarakat yang mandiri dan lestari.
 3. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian kepada kesehatan dan keselamatan Ibu dan keluarganya.
 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga.
 5. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek, keagamaan, pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
 6. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berusia diatas 60 Tahun keatas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
 8. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antar orang tua dan anak remaja.
 9. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.
- d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran.
1. Kader Program KKBPK melakukan kegiatan pencatatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan.
 2. Bersama Penyuluh KB sebagai Pembina wilayah melakukan pemetaan sasaran (Demografi, tahapan KS, dan lainnya)
 3. Kader Program KKBPK memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan diwilayah.
 4. Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan diwilayah berdasarkan peta PUS yang dibuat.
- e. Pelayanan Kegiatan
1. Pendewasaan usia perkawinan, Kesehatan reproduksi, Penanggulangan HIV/AIDS serta NAPZA.
 2. Pengaturan kelahiran, Pembinaan PUS peserta KB dan Penggerakan pelayanan bagi PUS yang belum ber KB
 3. Pembinaan ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL)
 4. peningkatan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS atau kegiatan ekonomi lainnya.
- f. Kemandirian
1. Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi ulangan (Pil dan Kondom)

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2. Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat,
3. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 10

- (1) Kader pelaksanaan program KKBPK melakukan pencatatan program setiap bulan pada jenjang tugas masing-masing.
- (2) Formulir pencatatan yang dilaksanakan oleh kader sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Formulir Kader PPKBD
 1. Pendataan Keluarga
 2. Pemutahiran Data Keluarga
 3. Pembuatan Peta Program Desa/Kelurahan
 4. Pencatatan rekapan PUS
 5. Pengendalian Lapangan Tingkat Desa (C1. Dal Des)
 - b. Formulir Kader SUB PPKBD
 1. Pendataan Keluarga
 2. Pemutahiran Data Keluarga
 3. Pembuatan Peta Program Dusun/Lingkungan
 4. Pencatatan Register PUS (R.1 PUS)
 5. Buku bantu unmet need
 6. Buku bantu Ibu hamil
- (3) Selain pencatatan sebagaimana ayat (2), Kader melaksanakan pencatatan lainnya yang diperintahkan oleh Koordinator penyuluh KB , Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Kader dalam pelaksanaan program KKBPk melakukan pelaporan program setiap bulan pada jenjang tugas masing-masing yang disampaikan Kepada Kepala Desa/Kelurahan setiap Bulan
- (2) Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri terdiri dari;
 - a. Formulir Kader PPKBD
 1. Pencatatatan Register PUS (R.1 PUS)
 2. C.1 Dal-Des
 3. Laporan Tribina
 - b. Formulir Kader SUB PPKBD
 1. Pencatatatan Register PUS (R.1 PUS)
 2. Laporan Buku bantu unmet need
 3. Buku bantu Ibu hamil
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII






SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KADER

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 12

- (1) Untuk diangkat menjadi Kader harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat keterangan sehat
 - b. Usia Minimum 20 Tahun, Maksimal 55 Tahun.
 - c. Pendidikan minimal SLTP Sederajat
 - d. Berdomisili diwilayah kerja dibuktikan dengan KTP
 - e. Bekerja sepenuh waktu dengan mengisi surat pernyataan

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- f. Tidak merangkap jabatan dalam tugas-tugas lain di desa dan kelurahan.
 - g. Mampu berbahasa dan bercakap dengan benar dan memahami bahasa lokal setempat.
 - h. Mengisi surat persetujuan Istri/Suami yang sudah menikah atau Orang tua yang belum menikah
 - i. Masa jabatan PPKBD selama 1 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan berlaku.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf h, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 13

Tata Cara pengangkatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat membuka penerimaan Kader PPKBD dan SUB di wilayah Kerja.
- b. Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat menyeleksi kader sesuai pasal 8 ayat (a).
- c. Pemerintah Desa dan Kelurahan memverifikasi dan menyeleksi calon kader yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 12
- d. Kader yang diusulkan harus mendapatkan Rekomendasi dari Koordinator Penyuluh KB Kecamatan sebelum diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Desa dan kelurahan mengusulkan dan me





Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 14

Kader diberhentikan:

- 1. Meninggal Dunia;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

2. Mengundurkan diri; dan
3. Tidak menghadiri pertemuan ditingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 15

- (1) Koordinator Penyuluh KB mengevaluasi hasil kerja kader disetiap tingkatan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koordinator penyuluh KB memberi rekomendasi kepada Kepala Desa/Kelurahan terhadap Kader yang tidak melaksanakan tugas dan Fungsi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar Kepala Desa/Kelurahan untuk menunda Pembayaran Honor Kader.

BAB IX
HONORARIUM DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Kader diberikan honorarium setiap bulan atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Dasar Pemberian Honorarium mengacu pada jumlah PUS diwilayah kerja masing-masing dengan klaster sebagai berikut:
 - a. Klaster 1 dengan jumlah PUS 0 sampai dengan 300 PUS
 - b. Klaster 2 dengan jumlah PUS 301 sampai dengan 500 PUS keatas
- (3) Honorarium Kader bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Kelurahan Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gorontalo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KABAG HONOR	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Belanja Kabupaten Gorontalo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan kinerja Kader dilakukan oleh Bupati Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang secara teknis dilaksanakan bersama-sama oleh Kepala Desa dan Koordinator Penyuluh KB
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi pencatatan dan pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas fungsi, kewajiban dan pemantauan penerimaan hak;
 - b. Melaksanakan Bimbingan teknis serta pelatihan tertentu; dan
 - c. Memberikan penghargaan atas prestasi Kader.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN





Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Kader yang telah diangkat melalui surat keputusan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir masa tugas dan atau dilakukan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	SK/1	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSTITUSI MASYARAKAT
PEDESAAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA

A. Format Surat Keterangan Sehat

SURAT KETERANGAN SEHAT

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini Dokter

menerangkan:

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Surat keterangan sehat ini dipergunakan sebagai

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

....., tanggal

Dokter Pemeriksa,

.....

B. Format Surat Pernyataan Izin Suami/Istri

SURAT PERNYATAAN IZIN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengizinkan istri saya :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Alamat :

Untuk menjadi Kader PPKBD/Sub PPKBD di Desa

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal

Hormat Saya,

.....

KABAG RUMAH	SKPD	YAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

C. Format Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Sepenuh Waktu

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA SEPENUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :





Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup bekerja sepenuh waktu sebagai kader PPKBD/SUB PPKBD Desa Kecamatan dan siap diberhentikan apabila tidak mematuhi pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

C/Des-Dal/13

**CATATAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)
TINGKAT DESA/KELURAHAN PADA PLKB**

DESA/KELURAHAN : Nama PLKB :
KECAMATAN : Tahun :

I. KEADAAN UMUM

NO.	URAIAN	B U L A N		
		Dst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah PPKBD yang dilaporkan			
2	Jumlah Sub PPKBD yang dilaporkan			
3	Jumlah kelompok KB yang dilaporkan			
4	Jumlah kelompok kegiatan BKB yang dilaporkan			
5	Jumlah kelompok kegiatan BKR yang dilaporkan			
6	Jumlah kelompok kegiatan BKL yang dilaporkan			
7	Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan			

II. KEGIATAN OPERASIONAL

NO.	URAIAN	B U L A N		
	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Frekwensi Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan			
2	Jumlah Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit			
3	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang aktif melakukan KIE KB			

III. PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

NO.	URAIAN	B U L A N		
	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKB			
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB			
	c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan			
	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok Kegiatan BKB yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB			
	i. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB menggunakan KKA			
	2	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR		
b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR				
c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan				

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR			
3	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL			
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL			
	c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan			
	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKL			

IV. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO.	URAIAN	B U L A N		
	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS			
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I			
2	Status KB dari anggota kelompok UPPKS :			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang PUS			
	b. Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang Peserta KB			
	Anggota Khusus dari Kelompok KPS dan KS I			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang PUS			
	b. Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang ber KB			
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS			
4	Jumlah Kelompok UPPKS yang dapat mengakses bantuan modal :			
4.1	Jumlah Kelompok UPPKS yang Memperoleh/ mengakses bantuan modal pada bulan ini :			
	a. APBN			
	b. APBD			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya			
4.2	Jumlah bantuan modal yang diakses pada bulan ini (juta rupiah):			
	a. APBN			
	b. APBD			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya			

Sumber Data Pengisian Formulir ini dari C/I/BKB/13, C/I/BKR/13, C/I/BKL/13, C/I/UPPKS/13, R/I/PUS/13, R/I/Toma-Toga-Toda/13

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
C	/	u	X	

C/Des-Dal/13

**CATATAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)
TINGKAT DESA/KELURAHAN PADA PLKB**

DESA/KELURAHAN : Nama PLKB :
KECAMATAN : Tahun :

I. KEADAAN UMUM

NO.	URAIAN	B U L A N		
		Dst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah PPKBD yang dilaporkan			
2	Jumlah Sub PPKBD yang dilaporkan			
3	Jumlah kelompok KB yang dilaporkan			
4	Jumlah kelompok kegiatan BKB yang dilaporkan			
5	Jumlah kelompok kegiatan BKR yang dilaporkan			
6	Jumlah kelompok kegiatan BKL yang dilaporkan			
7	Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan			

II. KEGIATAN OPERASIONAL

NO.	URAIAN	B U L A N		
	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Frekwensi Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan			
2	Jumlah Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit			
3	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang aktif melakukan KIE KB			

III. PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

NO.	URAIAN	B U L A N		
	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKB			
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB			
	c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan			
	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok Kegiatan BKB yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB			
	i. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB menggunakan KKA			
	2	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR		
b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR				
c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan				

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR			
3	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL			
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL			
	c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan			
	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKL			

IV. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO.	URAIAN	B U L A N		
	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS			
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I			
2	Status KB dari anggota kelompok UPPKS :			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang PUS			
	b. Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang Peserta KB			
	Anggota Khusus dari Kelompok KPS dan KS I			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang PUS			
	b. Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang ber KB			
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS			
4	Jumlah Kelompok UPPKS yang dapat mengakses bantuan modal :			
4.1	Jumlah Kelompok UPPKS yang Memperoleh/ mengakses bantuan modal pada bulan ini :			
	a. APBN			
	b. APBD			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya			
4.2	Jumlah bantuan modal yang diakses pada bulan ini (juta rupiah):			
	a. APBN			
	b. APBD			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya			

Sumber Data Pengisian Formulir ini dari C/I/BKB/13, C/I/BKR/13, C/I/BKL/13, C/I/UPPKS/13, R/I/PUS/13, R/I/Toma-Toga-Toda/13

KABAG RUMAH	SKPD	AS 1	SEKDA	WABU

Lembar Sambungan C/I/Des-Dal/13

V. HASIL PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB MENURUT TAHAPAN KS, TEMPAT PELAYANAN DAN STATUS PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NO.	URAIAN		B U L A N				
			Tahapan KS		Peserta JKN		
			Seluruh Tahapan KS	KPS DAN KS I	PBI	Bukan PBI	
							(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)						
2	Jumlah Peserta KB Aktif						
	a. IUD (I)	Pemerintah					
		Swasta					
		Total (Pemerintah + Swasta)					
	b. MOW (OW)	Pemerintah					
		Swasta					
		Total (Pemerintah + Swasta)					
	c. MOP (OP)	Pemerintah					
		Swasta					
		Total (Pemerintah + Swasta)					
	d. Kondom (K)	Pemerintah					
		Swasta					
		Total (Pemerintah + Swasta)					
	e. Implan (IP)	Pemerintah					
		Swasta					
		Total (Pemerintah + Swasta)					
	f. Suntik (S)	Pemerintah					
		Swasta					
		Total (Pemerintah + Swasta)					
	g. Pil (P)	Pemerintah					
		Swasta					
		Total (Pemerintah + Swasta)					
	3	Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB					
		a. Hamil (H)					
b. Ingin Anak Segera (IAS)							
c. Ingin Anak Ditunda (IAT)							
d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)							

Sumber Data Pengisian Formulir ini dari C/I/BKB/13, C/I/BKR/13, C/I/BKL/13, C/IUPPKS/13, R/I/PUS/13, R/I/Toma-Toga-Toda/13

KABAG HUKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Keterangan Cara Pengisian Formulir : C//Des-Dal/13

- A. Data Wilayah**
- 1 : Diisi nama desa/kelurahan dengan huruf cetak
 - 2 : Diisi nama kecamatan dengan huruf cetak
 - 3 : Diisi dengan nama PLKB dengan huruf cetak
 - 4 : Diisi dengan tahun saat mengisi C//Des-Dal/13
- B. Data Tabel I. Keadaan Umum**
- 1 : C//BKB/13, C//BKR/13, C//BKL/13, C//UPPKS/13
 - 2 : Diisi dengan angka PPKBD yang melapor sesuai bulan kegiatan
 - 3 : Diisi dengan angka Sub PPKBD yang melapor sesuai bulan kegiatan
 - 4 : Diisi dengan angka Kelorinop KB yang melapor sesuai bulan kegiatan
 - 5 : Diisi dengan angka Kelompok Kegiatan BKB yang melapor sesuai bulan kegiatan
 - 6 : Diisi dengan angka Kelompok Kegiatan BKR yang melapor sesuai bulan kegiatan
 - 7 : Diisi dengan angka Kelompok Kegiatan BKL yang melapor sesuai bulan kegiatan
- C. Data Tabel II. Kegiatan Operasional**
- 1 : R//Toma-Toga-Toda/13
 - 2 : Diisi dengan angka frekwensi Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan sesuai bulan kegiatan
 - 3 : Diisi dengan angka frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit sesuai bulan kegiatan
 - 4 : Diisi dengan angka tokoh masyarakat/agama/adat yang aktif melakukan KIE KB sesuai bulan kegiatan
- D. Data Tabel III. Pembinaan Ketahanan Keluarga**
- 1a : C//BKB/13, C//BKR/13, C//BKL/13, C//UPPKS/13
 - 1b : Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKB sesuai bulan kegiatan
 - 1c : Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB sesuai bulan kegiatan
 - 1d : Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan
 - 1e : Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS
 - 1f : Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS KPS dan KS I
 - 1g : Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi peserta KB dan KS I sesuai bulan kegiatan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

1h	h	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB sesuai bulan kegiatan
1i	i	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB menggunakan KKA	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB menggunakan KKA sesuai bulan kegiatan
2a	a	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan
2b	b	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan
2c	c	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan sesuai bulan kegiatan
2d	d	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS sesuai bulan kegiatan
2e	e	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan
2f	f	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB sesuai bulan kegiatan
2g	g	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan
2h	h	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan
3a	a	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL sesuai bulan kegiatan
3b	b	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL sesuai bulan kegiatan
3c	c	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan sesuai bulan kegiatan
3d	d	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS sesuai bulan kegiatan
3e	e	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS KPS dan KS I	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan
3f	f	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB sesuai bulan kegiatan
3g	g	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan
3h	h	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKL	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKL sesuai bulan kegiatan

: C/IIUPPKS/13

1. Sumber Data Pengisian Tabel Ini Dari
 - a. Jumlah anggota kelompok UPPKS
 - b. Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I
2. Status KB dari Anggota UPPKS

Anggota Keseluruhan

KABAG HUKUM	SKPD	MAS 1	SEKRA	WABUP

- a. Jumlah Anggota Kelompok UPPKS Yang PUS
 - b. Jumlah PUS Anggota Kelompok UPPKS yang Peserta KB Anggota Khusus Kelompok KPS dan KS I
 - a. Jumlah Anggota Kelompok UPPKS KPS dan KS I yang PUS
 - b. Jumlah PUS Anggota Kelompok UPPKS KPS dan KS I yang Ber KB
3. Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS
 - 4.1 Jumlah Kelompok UPPKS yang Memperoleh/Mengakses bantuan Modal Pada Bulan Ini
 - a. APBN
 - b. APBD
 - c. KRISTA
 - d. KUR
 - e. PNPM
 - f. LAINNYA
 - 4.2 Jumlah Bantuan Modal Yang Diperoleh/Diakses Pada Bulan Ini
 - a. APBN
 - b. APBD
 - c. KRISTA
 - d. KUR
 - e. PNPM
 - f. LAINNYA
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS yang PUS sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang Peserta KB sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang PUS sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah PUS anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang Ber KB sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah pertemuan kelompok UPPKS sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari APBN sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari APBD sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari KRISTA sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari KUR sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari PNPM sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari sumber lainnya sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari APBN sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari APBD sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari KRISTA sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari KUR sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari PNPM sesuai bulan kegiatan
- Kolom 3-14 : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari sumber lainnya sesuai bulan kegiatan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Keterangan Cara Pengisian Formulir : Lembar Sambungan C//Des-Dal/13

F. HASIL PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB MENURUT TAHAPAN KS, TEMPAT PELAYANAN DAN STATUS PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Sumber Data Pengisian Tabel Ini Dari

: R//PUS/13

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
 Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kelompok tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS dan KS I) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

2. Jumlah Peserta KB Aktif

Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

IUD

Pemerintah Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif IUD melalui jalur pelayanan pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Swasta Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif IUD melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Total Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif IUD pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

MOW

Pemerintah Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOW melalui jalur pelayanan pemerintah sepada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Swasta Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOW melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Total Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif MOW pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Pemerintah Kolom 3-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOP melalui jalur pelayanan pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

KABAG HUKUM	SKDD	AS 1	SEKDA	WABUP

MOP	Swasta	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOP melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Total	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif MOP pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Pemerintah	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Kondorn melalui jalur pelayanan pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
Kondom	Swasta	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Kondom melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Total	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif Kondom pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Pemerintah	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Implan melalui jalur pelayanan pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
Implant	Swasta	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Implan melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Total	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif Implan pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Pemerintah	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Suntik melalui jalur pelayanan pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
Suntik	Swasta	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Suntik melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Total	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif Suntik pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
	Pemerintah	Kolom 3-50	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Pil melalui jalur pelayanan pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

MURAH RAJAH	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
/	/	W	/	/

- Pil
- Swasta
- Kolom 3-50
- : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Pil melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
- Total
- Kolom 3-50
- : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif Pil pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
3. Jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB
- a. Hamil
- Kolom 3-50
- : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
- b. Ingin Anak Segera
- Kolom 3-50
- : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena Hamil pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
- c. Ingin Anak Ditunda
- Kolom 3-50
- : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena Ingin Anak Segera pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
- d. Tidak Ingin Anak Lagi
- Kolom 3-50
- : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena Tidak Ingin Anak Lagi pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

KABUPATEN HUMAS	SKD	IAS 1	SEKDA	WABUP
	1	W		

**LAPORAN BULANAN
KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA**

BULAN
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
TAHUN
KABUPATEN

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KET
1	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI SASARAN KELOMPOK KEGIATAN		
2	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN		
3	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG HADIR DALAM PERTEMUAN		
4	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG BER STATUS PUS		
5	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG BERSTATUS PUS KPS DAN KS.1		
6	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG MENJADI PESERTA KB		
7	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG MENJADI PESERTA KB KPS DAN KS.I		
8	JUMLAH PERTEMUAN KEGIATAN KELOMPOK		
9	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA MENGGUNAKAN KKA		
10	JUMLAH KADER		
11	JUMLAH BALITA YANG DIMILIKI KELOMPOK KELUARGA MENJADI SASARAN KELOMPOK	KELOMPOK UMUR	
		0- < 1 Thn	
		1 - < 2 Thn	
		2- < 3 Thn	
		3 - < 4 Thn	
		4 - < 5 Thn	
		5 - < 6 Thn	
		JUMLAH	

MENGETAHUI
KADES / LURAH

KETUA KADER BKB

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

**LAPORAN BULANAN
KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA**

BULAN
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
TAHUN
KABUPATEN

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KET
1	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI SASARAN KELOMPOK KEGIATAN		
2	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN		
3	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG HADIR DALAM PERTEMUAN		
4	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG BER STATUS PUS		
5	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG BERSTATUS PUS KPS DAN KS.1		
6	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG MENJADI PESERTA KB		
7	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG MENJADI PESERTA KB KPS DAN KS.I		
11		KELOMPOK UMUR	
		10- < 11 Thn	
		11 - < 12 Thn	
		12- < 13 Thn	
		13 - < 14 Thn	
		14 - < 15 Thn	
		15 - < 16 Thn	
		16 - < 17 Thn	
		17 - < 18 Thn	
		18 - < 19 Thn	
		19 - < 20 Thn	
		20- < 21Thn	
		21 - < 22 Thn	
		22 - < 25 Thn	
		23 - < 24 Thn	
	JUMLAH RREMAJA	JUMLAH	

MENGETAHUI
KADES / LURAH

KETUA KADER BKR

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

**LAPORAN BULANAN
KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA**

BULAN
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
TAHUN
KABUPATEN

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KET
1	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI SASARAN		
2	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK		
3	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG AKTIF DALAM KEGIATAN		
4	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG BER STATUS PUS		
5	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK YANG MASIH BERSTATUS PUS DARI KPS DAN KS.1		
6	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG MENJADI PESERTA KB		
7	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN YANG MENJADI PESERTA KB DARI KPS DAN KS.I		
8	JUMLAH LANSIA	50 > 60 TAHUN	
		60 > TAHUN	
		JUMLAH	
9	JUMLAH PERTEMUAN/PENYULUHAN		
10	JUMLAH KADER		

MENGETAHUI
KADES / LURAH

KETUA KADER BKR

.....

.....

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

DATA UNMEET NEED
KECAMATAN
KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA AKSEPTOR	UMUR	NAMA SUAMI	JML ANAK	UMUR ANAK TERKECIL	ALAMAT	UNMEET NEED	
							IAT	TIAL
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
dst..								

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

DATA IBU HAMIL DAN PREDIKSI KELAHIRAN

DESA
KECAMATAN

NO	NAMA	UMUR	BULAN									ALAMAT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
dst...												

KABAG HUKUM	SKB	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

